

## **2. Dasar Hukum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019; dan
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

### 3. Proyeksi Rancangan APBD Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2019

#### a) Pendapatan Daerah

Target **Pendapatan Daerah** pada Rancangan APBD Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar **Rp. 2.200.686.505.470,00** apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada APBD 2018 sebelum perubahan sebesar **Rp. 2.316.893.080.242,00** yang berarti turun sebesar **Rp. 116.206.574.772,00** atau turun 5 %.

Penurunan tersebut terutama pada komponen Dana Perimbangan yakni penerimaan target Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) karena masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 sehingga penentuan target pendapatan Dana Perimbangan tahun 2019 terutama Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak didasarkan pada tren realisasi pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir. Sedangkan target pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi masih menunggu surat resmi dari pemberi bantuan.

Adapun komposisi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 497.070.335.477,00
2) Dana perimbangan	Rp. 1.252.236.413.163,00
3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 451.379.756.830,00

#### Penjelasan :

1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 497.070.335.477,00

direncanakan diperoleh dari :

a. Hasil Pajak Daerah	Rp. 298.320.000.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah	Rp. 45.341.540.726,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	Rp. 4.881.881.601,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 148.526.913.150,00

2) Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.252.236.413.163,00

direncanakan diperoleh dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp. 71.006.441.163,00
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 973.768.511.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	Rp. 207.461.461.000,00

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 451.379.756.830,00

direncanakan diperoleh dari :

a. Pendapatan Hibah (Dana BOS)	Rp. 75.390.600.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	0,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	0,00
e. Pendapatan Lainnya (Dana Desa)	Rp.	208.535.750.000,00

#### b) Belanja Daerah

Alokasi anggaran Belanja Daerah Kab. Mojokerto pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp. 2.234.186.505.470,00 apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebelum perubahan sebesar Rp. 2.341.043.020.124,00 berarti turun sebesar Rp. 106.856.514.654,00 atau turun 5 %. Hal ini dikarenakan belanja yang bersumber dari DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi belum bisa dianggarkan karena belum ada Peraturan Presiden dan Surat Gubernur.

Adapun komposisi Belanja Daerah pada APBD Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.398.739.965.737,90
2) Belanja Langsung	Rp.	835.446.539.732,00

#### Penjelasan :

##### 1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang berarti bahwa ada dan tidak adanya kegiatan Pemerintah Daerah tetap harus menganggarkan, seperti gaji pegawai.

Belanja Tidak Langsung pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp. 1.398.739.965.737,90 digunakan untuk :

a. Belanja Pegawai	Rp.	970.129.330.945,20
b. Belanja Hibah	Rp.	15.465.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	500.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota Dan Pemerintahan Desa	Rp.	39.507.237.460,70
e. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	371.138.397.332,00
f. Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00

**c) Pembiayaan Daerah :**

- 1) Penerimaan pembiayaan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 dialokasikan sebesar Rp. 48.500.000.000,00 yang direncanakan diperoleh dari :  
Estimasi SILPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 48.500.000.000,00
  
- 2) Pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 yang direncanakan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan Pemilukada.

**PLAFON ANGGARAN MASING-MASING PERANGKAT DAERAH T.A. 2019**

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara			Prosentase terhadap Total Belanja
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah	
1	Dinas Pendidikan	597.388.809.180,46	127.040.132.000,00	724.428.941.180,46	32,42
2	Dinas Kesehatan	57.487.147.000,00	93.623.560.105,00	151.110.707.105,00	6,76
3	RSUD. Prof. Dr. Soekandar	15.596.796.000,00	117.091.247.993,00	132.688.043.993,00	5,94
4	RSUD. RA. Basoeni	8.626.438.500,00	47.320.577.000,00	55.947.015.500,00	2,50
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	24.584.201.500,00	165.189.141.090,10	189.773.342.590,10	8,49
6	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	7.871.508.000,00	6.011.238.000,00	13.882.746.000,00	0,62
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.865.482.500,00	2.587.484.600,00	5.452.967.100,00	0,24
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6.176.492.000,00	16.723.438.000,00	22.899.930.000,00	1,02
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.509.505.000,00	3.785.390.752,00	8.294.895.752,00	0,37
10	Dinas Sosial	4.917.303.000,00	4.616.454.000,00	9.533.757.000,00	0,43
11	Dinas Tenaga Kerja	4.127.992.000,00	2.087.500.000,00	6.215.492.000,00	0,28
12	Dinas Pangan Dan Perikanan	5.878.289.500,00	2.408.804.000,00	8.287.093.500,00	0,37
13	Dinas Lingkungan Hidup	12.494.688.000,00	19.072.340.000,00	31.567.028.000,00	1,41
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.191.411.500,00	2.006.727.250,00	6.198.138.750,00	0,28
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.226.235.000,00	5.695.920.000,00	9.922.155.000,00	0,44
16	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	4.128.532.500,00	4.226.674.700,00	8.355.207.200,00	0,37
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.830.868.000,00	3.700.705.000,00	7.531.573.000,00	0,34
18	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	3.934.536.500,00	2.877.400.000,00	6.811.936.500,00	0,30

19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.504.453.000,00	1.550.039.000,00	6.054.492.000,00	0,27
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.530.130.000,00	1.483.684.000,00	5.013.814.000,00	0,22
21	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	5.654.930.000,00	18.203.900.000,00	23.858.830.000,00	1,07
22	Dinas Pertanian	14.737.356.500,00	5.988.751.000,00	20.726.107.500,00	0,93
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.608.077.000,00	17.397.725.000,00	23.005.802.000,00	1,03
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	876.100.000,00		876.100.000,00	0,04
25	Sekretariat Daerah	17.391.453.000,00	31.821.203.300,00	49.212.656.300,00	2,20
26	Sekretariat DPRD	31.966.834.286,00	31.760.814.200,00	63.727.648.486,00	2,85
27	Kecamatan Sooko	2.999.304.500,00	432.560.000,00	3.431.864.500,00	0,15
28	Kecamatan Trowulan	2.462.667.000,00	436.420.000,00	2.899.087.000,00	0,13
29	Kecamatan Puri	2.911.173.500,00	426.268.000,00	3.337.441.500,00	0,15
30	Kecamatan Bangsal	2.858.746.000,00	445.799.000,00	3.304.545.000,00	0,15
31	Kecamatan Gedeg	2.720.253.500,00	425.930.000,00	3.146.183.500,00	0,14
32	Kecamatan Kemlagi	2.398.484.500,00	443.930.000,00	2.842.414.500,00	0,13
33	Kecamatan Jetis	2.245.019.500,00	443.480.000,00	2.688.499.500,00	0,12
34	Kecamatan Dawarblandong	2.723.730.500,00	423.783.000,00	3.147.513.500,00	0,14
35	Kecamatan Mojosari	5.400.624.000,00	1.388.185.000,00	6.788.809.000,00	0,30
36	Kecamatan Pungging	2.456.286.000,00	425.070.000,00	2.881.356.000,00	0,13
37	Kecamatan Ngoro	2.764.435.000,00	444.060.000,00	3.208.495.000,00	0,14
38	Kecamatan Kutorejo	2.232.290.000,00	385.956.000,00	2.618.246.000,00	0,12
39	Kecamatan Dianggu	2.272.857.500,00	423.411.000,00	2.696.268.500,00	0,12
40	Kecamatan Gondang	2.789.417.000,00	445.440.000,00	3.234.857.000,00	0,14
41	Kecamatan Jatirejo	2.390.875.500,00	438.280.000,00	2.829.155.500,00	0,13

42	Kecamatan Trawas	1.894.790.000,00	430.099.000,00	2.324.889.000,00	0,10
43	Kecamatan Pacet	2.588.996.000,00	427.884.000,00	3.016.880.000,00	0,14
44	Kecamatan Mojoanyar	2.246.600.500,00	424.800.000,00	2.671.400.500,00	0,12
45	Inspektorat Kabupaten	7.220.002.500,00	3.823.630.000,00	11.043.632.500,00	0,49
46	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	5.421.824.500,00	5.552.717.500,00	10.974.542.000,00	0,49
47	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	456.827.328.771,44	66.314.349.600,00	523.141.678.371,44	23,42
48	Badan Pendapatan Daerah	19.757.397.500,00	11.663.872.642,00	31.421.270.142,00	1,41
49	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.051.292.500,00	5.109.764.000,00	9.161.056.500,00	0,41
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.398.739.965.737,90</b>	<b>835.446.539.732,10</b>	<b>2.234.186.505.470,00</b>	<b>100,00</b>